

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan sebuah virus yang mudah menular, dan memiliki gejala umum seperti demam, batuk, dan kelelahan. Sifatnya yang mudah menular menyebabkan virus ini ditetapkan sebagai sebuah pandemi baru di dunia. Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Saat ini, virus Covid-19 telah menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global<sup>1</sup>.

Berdasarkan data harian WHO, dalam 24 jam terdapat peningkatan kasus positif sebanyak 284.441 jiwa, dan peningkatan kasus kematian sebanyak 6.565 jiwa<sup>2</sup>. Sampai tanggal 8 Agustus 2020, tercatat dalam laporan harian bahwa pandemi ini telah mewabah ke 216 negara dengan kasus terkonfirmasi 19,2 juta dan kasus meninggal mencapai 716.075 jiwa. Sedangkan jika melihat kasus di Indonesia sampai tanggal 9 Agustus 2020, virus ini telah mencapai kasus positif mencapai 125.396 dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> WHO, Q&A on coronaviruses (COVID-19), [who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answer-hub/](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answer-hub/), 17 April 2020. Diakses pada 25 Juli 2020

<sup>2</sup> WHO, Coronavirus Disease (Covid-19) situation report-185, 8 Agustus 2020.

<sup>3</sup> Covid19.go.id., Infografis Covid-19 (8 Agustus 2020), Diakses pada 9 Agustus 2020.

Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia termasuk tinggi. Dalam satu hari, terdapat penambahan 1.868 kasus baru di Indonesia. Peningkatan kasus tertinggi terjadi pada provinsi-provinsi yang memiliki kota besar seperti Provinsi Sumatera Utara, keseluruhan provinsi yang ada di pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Sedangkan jika dilihat dari peningkatan kasus harian, rata-rata terdapat sekitar 1500 kasus baru per hari. Hal ini sangat mengkhawatirkan, salah satunya juga disebabkan karena Indonesia memasuki era *new normal*, dan diperlukan strategi dan langkah pencegahan yang serius dari semua pihak untuk penanggulangan wabah ini.

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk bencana non alam. Sebagai bentuk tanggap darurat akan bencana, pemerintah harus mampu menyusun langkah manajemen bencana yang baik dalam penanggulangan Covid-19. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Bab 1 Pasal 3 menyatakan bahwa: “penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Kegiatan pra bencana meliputi kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kegiatan pada saat bencana berupa kegiatan tanggap darurat, dan kegiatan pasca bencana berupa kegiatan pemulihan<sup>4</sup>.

Untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, beberapa negara di dunia memberlakukan *lockdown*. Sedikit berbeda dengan negara lain, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan PSBB diatur dalam

---

<sup>4</sup> Bagus Aryo dan Rissalwan Habdy Lubis, *Kebencanaan dan Kesejahteraan: Konsep dan Praktek*, (Jakarta: LKPS, 2014). Hlm.4

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan ini berupa pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB berbeda dengan *lockdown*. Pada PSBB, tidak menutup kemungkinan masyarakat tetap melakukan aktifitas sehari-hari, namun mengurangi kegiatan yang mengundang banyak orang<sup>5</sup>. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran semakin meluas Covid-19.

Usaha serius pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 bukan hanya pada tataran pemerintah pusat, tapi juga sampai pada tingkat desa. Sebagai bentuk upaya mitigasi Covid-19 di tingkat desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Desa tanggap Covid-19 dimaksudkan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Desa, sedangkan program Padat Karya Tunai Desa dimaksudkan untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi desa di masa pandemi.

Respon terhadap kebijakan ini disetiap desa tentu akan sangat bervariasi karena berbedanya kondisi masing-masing desa baik dari aspek sosial ekonomi maupun

---

<sup>5</sup> Detik.com, “Jokowi Sebut Beruntung Pilih PSBB ini bedanya dengan lockdown”, 7 Mei 2020. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5005637/jokowi-sebut-beruntung-pilih-psbb-ini-bedanya-dengan-lockdown>, Diakses pada 9 Agustus 2020

budaya, dan seberapa besar masyarakat desa merasakan dampak langsung dan tidak langsung dari Covid-19. Dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa, pembentukan relawan desa diketuai langsung oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan Covid-19 di tingkat desa diduga dipengaruhi oleh aspek kepemimpinan kepala desa, karena dalam satuan tugas atau relawan desa yang dibentuk akan melibatkan semua pihak yang ada di Desa.

Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat, mulai dari pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, pendamping desa, tenaga medis, dan tokoh masyarakat. Kegiatan pencegahan yang dilaksanakan berupa edukasi melalui sosialisasi yang tepat terkait Covid-19, pendataan penduduk rentan sakit, penyemprotan disinfektan, penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, penyediaan informasi penting terkait Covid-19, melaksanakan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan cara pemantauan pergerakan masyarakat desa, pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, serta pemantauan perkembangan orang dalam pantauan Covid-19, dan memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan banyak orang<sup>6</sup>.

Karakteristik desa yang berbeda-beda, maka penanggulangan wabah Covid-19 di masing-masing desa memerlukan pendekatan manajerial yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nilai, adat istiadat, dan kebiasaan dari masyarakat.

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 merupakan sebuah arahan terkait kegiatan yang harus dilakukan desa dalam penanggulangan Wabah Covid-19, namun pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada desa, termasuk jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup di desa. Oleh karena itu, penanggulangan wabah Covid-19 harus dilakukan mulai dari tingkat terendah, yaitu pada tingkat desa. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat penanggulangan wabah Covid-19 di tingkat desa.

Desa Tanggap Covid-19 tidak akan terwujud jika tidak ada kerja sama semua pihak di tingkat Desa. Oleh karena itu dibutuhkan sosok pemimpin, yang dalam hal ini Kepala Desa yang mampu bekerja sama dengan semua unsur dalam penanggulangan Covid-19. Penerapan model kepemimpinan kolaboratif diduga sangat tepat dalam penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga kajian tentang bagaimana kepala desa melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan para pihak (stakeholder) dalam penanganan Covid-19 cukup menarik dilakukan.

Pelibatan semua unsur yang ada di masyarakat membuat pemimpin memerlukan strategi baru dalam kepemimpinannya. Goman mengungkapkan bahwa salah satu paradigma baru dalam kepemimpinan, yaitu kepemimpinan kolaboratif. Dimana : *“some of the benefits of collaborative leadership are the creation of inclusive environments that energize teams, and release creativity..”*<sup>7</sup>. Kepemimpinan kolaboratif mampu memberikan energi positif kepada tim dan akan dapat

---

<sup>7</sup> Roberta K. Timorthy, *Literature Review on Collaborative Leadership*, Ontario Public Health Association. Hlm. 4.

memunculkan kreativitas baru dari para stakeholder yang terlibat. Peran kepemimpinan dalam pemerintahan kolaboratif adalah membantu stakeholder menemukan solusi *win-win*<sup>8</sup>.

Penelitian terkait kepemimpinan kolaboratif telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*). *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash merupakan suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan secara bersamaan dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintahan untuk membuat keputusan bersama. Lebih lanjut Ansell dan Gash menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu bentuk pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, *deliberative* yang bertujuan untuk membuat dan mereapkan kebijakan publik serta program ataupun aset publik<sup>9</sup>.

Chris Anshell dan Alison Gash menyatakan bahwa kepemimpinan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Collaborative Governance*. Mereka menyusun model *collaborative governance* dengan proses kolaboratif sebagai unsur

---

<sup>8</sup> Ella Wargadinata, "Kepemimpinan Kolaboratif", (Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII Edisi I 2016)

<sup>9</sup> Syamsurizaldi, Annisa Aulia Putri, dan Suherdian Antoni, "model Collaborative Governance pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat", (Jurnal Pembangunan Nagari Vol. 4 Nomor 1, 2019, pp. 99-121). Hal. 102

utama yang dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kelembagaan dalam pencapaian hasil yang diinginkan<sup>10</sup>. Anshell dan Gash dalam penelitiannya yang berjudul “*Steward, Mediator, and Catalyst: Toward a Model of Collaborative Leadership*” menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini mengembangkan model kepemimpinan kolaboratif bagi pemerintah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kepemimpinan kolaboratif harus mampu memainkan peran sebagai pelayan, mediator, maupun katalisator<sup>11</sup>. *Collaborative leadership* sendiri juga dimaknai sebagai *facillitative leadership, adaptive leadership, integral leadership, and catalytic leadership*, yang berfokus pada pembagian kekuasaan di kelompok, unit, dan organisasi<sup>12</sup>.

Jika dalam *collaborative governance* lebih memfokuskan pada interaksi antara pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan kolaboratif lebih berfokus pada pengupayaan kerja sama dan mengkoordinasikan sekelompok orang yang bekerja sama melampaui kepentingan pribadi mereka untuk mencapai tujuan bersama, dalam artian, kepemimpinan kolaboratif menempatkan posisi yang sama antara pemimpin dan para stakeholder.

---

<sup>10</sup> Chrish Anshell dan Alison Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice”, (Journal of Public Administration Research and Theory Vol 18(4), 2008, Hlm 543-571)

<sup>11</sup> Chrish Anshell dan Alison Gash, “Steward, Mediator, and Catalyst: Toward a Model of Collaborative Leadership”, (The Innovational Journal: The Public Sector Innovational Journal, Volume 17 (1) 2012, article 7).

<sup>12</sup> Nicholas Mwaura Njenga dan Stephen Maina, “The Influence of Collaborative Leadership on Team’s Performance (A Case Study of Kingdom SACCO)”, (IOSR Journal of Business and Management Vol. 20, Issues 12. Ver. VI, 2018, pp. 54-58), Hal. 54.

Penelitian De Meyer yang berjudul “*Collaborative Leadership: New Perspective in Leadership Development*” menyatakan bahwa ada empat kunci yang menggambarkan kepemimpinan di masa depan, yaitu kolaborasi, mampu mendengarkan, mempengaruhi, dan beradaptasi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan baru dari studi kepemimpinan, dan menyimpulkan bahwa dalam penerapan kepemimpinan kolaboratif perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut: (1) mendapatkan pola pikir yang benar, (2) mengurangi biaya transaksi, (3) melihat melampaui batas organisasi, (4) membangun konsensus, (5) kemampuan menciptakan jaringan, (6) mengelola dualitas<sup>13</sup>.

Penelitian mengenai kepemimpinan kolaboratif juga dilakukan oleh Heather Getha-Taylor dan Ricardo S. Morse, dengan judul penelitian “*Collaborative Leadership Development for Local Government Officials: Exploring Competencies and Program Impact*”. Penelitian ini juga merupakan bentuk pengembangan kepemimpinan kolaboratif pada pemerintahan daerah, yaitu mengembangkan pola kepemimpinan tradisional menjadi pola kepemimpinan baru yang lebih mampu memecahkan permasalahan yang terjadi. Taylor dan Morse menyatakan bahwa ketika *Collaborative Governance* terus menyatu menjadi kerangka kerja yang dominan atau bahkan paradigma untuk administrasi publik secara umum (dan pemerintahan daerah secara khusus), perlu diperhatikan kebutuhan pengembangan kepemimpinan individu-

---

<sup>13</sup> De Meyer, A. “*Collaborative Leadership: New Perspective in Leadership Development*”, (Cambridge Judge Business and School: Working Paper Series, 2010)

individu yang menerapkan tata kelola kolaboratif<sup>14</sup>. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya kepemimpinan kolaboratif dalam mengelola pemerintahan kolaboratif.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa kepemimpinan merupakan unsur yang penting dalam penanggulangan bencana. Penelitian Ketaren yang berjudul *Kepemimpinan Krisis Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten Karo Pada Manajemen Kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Sinabung* menemukan bahwa kepemimpinan krisis Bupati Karo tidak memenuhi kriteria atau konsep kepemimpinan yang dibutuhkan manajemen bencana, sehingga mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat tidak berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana<sup>15</sup>. Sementara menurut Ketaren, konsep kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam manajemen bencana. Ketika konsep kepemimpinan tersebut tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan manajemen bencana, maka sistem komando tanggap darurat tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya dalam penanggulangan bencana<sup>16</sup>.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yuniarti dalam penelitian yang berjudul *Kepemimpinan dan Pengelolaan Modal Sosial dalam Penanggulangan Bencana Banjir* dan berkesimpulan bahwa kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam mengelola

---

<sup>14</sup> Heather Getha-Taylor dan Richardo S. Morse, "Collaborative Leadership Development for Local Government Officials: Exploring Competencies and Program Impact", (Public Administration Quarterly, Vol. 37 (1) 2013, pp. 71-102).

<sup>15</sup> Sinar Otniel Ketaren, "Kepemimpinan Krisis Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten Karo pada Manajemen Kedaruratan Kesehatan Bencana Erupsi Gunung Sinabung", (USU: Prodi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Disertasi. 2016)

<sup>16</sup> Ibid.

modal sosial yang ada. Pemimpin harus mampu bersinergi dengan masyarakat, agar dapat membantu penanggulangan bencana<sup>17</sup>.

Beberapa penelitian yang telah dibahas sebelumnya menemukan bahwa kepemimpinan merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan bencana. Namun, melihat banyaknya aktor yang harus dilibatkan dalam penanggulangan bencana, tentu dibutuhkan suatu gaya kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan kolaboratif. Namun, sangat sedikit penelitian sebelumnya yang mengkaji secara spesifik kepemimpinan kolaboratif dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kepemimpinan kolaboratif dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Melihat banyaknya aktor yang dilibatkan dalam penanggulangan wabah Covid-19 di tingkat desa, peneliti berasumsi bahwa seorang kepala desa harus mampu merangkul semua stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi wabah Covid-19. Pelibatan banyak stakeholder ini tentu memerlukan gaya kepemimpinan tersendiri, agar penanganan Covid-19 dapat maksimal. Beberapa literatur terdahulu menemukan bahwa kepemimpinan dibutuhkan dalam penanggulangan bencana, namun belum ada penelitian terkait model kepemimpinan kolaboratif dalam penanggulangan bencana. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepemimpinan kolaboratif Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan wabah Covid-19. Wali Nagari harus mampu

---

<sup>17</sup> Tatik Yuniarti, "Kepemimpinan dan Pengelolaan Modal Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Banjir". Jurnal makna Volume 3 Nomor 1 Maret 2018, 94-128.

merangkul semua stakeholder yang ada di desa, dan bersama-sama melakukan upaya penanggulangan wabah Covid-19 di nagari

## 1.2 Rumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang ikut terdampak wabah Covid-19. Wabah Covid-19 pertama kali di Sumatera Barat ditemukan pada tanggal 24 Maret 2020 yang menyerang seorang warga Kota Bukittinggi. Puncak kasus Covid-19 di Sumatera Barat gelombang pertama terjadi pada bulan April-Mei 2020. Namun, kasus mulai menurun pada bulan Juni 2020. Penurunan kasus ini membuat Pemerintah Provinsi memperlonggar kewaspadaan dan mempersiapkan *new normal* di Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan kebijakan *new normal* ini berdampak kembali pada penambahan kasus di Provinsi Sumatera Barat. Pada pertengahan Juli-Agustus, terjadi pelonjakan kasus gelombang kedua di Provinsi Sumatera Barat. Kasus menjadi semakin meningkat, dan membuat pemerintah harus kembali waspada dengan ancaman gelombang kedua kasus Covid-19. Sampai tanggal 10 Agustus, terdapat penambahan 30 kasus baru dari hari sebelumnya, menjadi 1175 kasus positif. Sedangkan peningkatan kasus tertinggi terjadi pada gelombang kedua Covid-19 di Sumbar, yaitu pada tanggal 31 Juli 2020 dan tanggal 7 Agustus 2020 dengan peningkatan sebanyak 41 kasus per hari. Sebaran kasus tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Daftar Kabupaten/Kota Terdampak di Provinsi Sumatera Barat**  
**Per 10 Agustus 2020**

No	Kabupaten/Kota	Suspect	Positif	Sembuh	Meninggal
1	Padang	187	788	567	27
2	Kota Solok	0	49	8	0
3	Agam	8	45	23	0
4	Dharmasraya	0	34	32	0
5	Kab. Solok	1	33	8	3
6	Padang Panjang	1	32	32	0
7	Padang Pariaman	7	29	21	1
8	Tanah Datar	3	23	13	1
9	Payakumbuh	1	23	22	0
10	Pesisir Selatan	4	21	17	1
11	Bukittinggi	1	20	17	1
12	Sawah Lunto	1	18	2	0
13	Lima Puluh Kota	1	15	15	0
14	Sijunjung	2	12	11	0
15	Solok Selatan	0	9	9	0
16	Kepulauan Mentawai	0	8	8	0
17	Pariaman	0	7	2	0
18	Pasaman	1	5	5	0
19	Pasaman Barat	1	4	2	0
<b>Total</b>		<b>219</b>	<b>1175</b>	<b>814</b>	<b>34</b>

Sumber: corona.sumbarprov.go.id, 2020

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa kasus terkonfirmasi Covid-19 sudah mencapai angka 1175 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah terkonfirmasi di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat menyumbang 0,9%. Hal ini memperlihatkan bahwa kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat masih terkendali. Keberhasilan Provinsi Sumatera Barat dalam pengendalian Covid-19 di Sumatera Barat diapresiasi oleh

Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari lima provinsi terbaik dalam menangani Covid-19<sup>18</sup>.

Keberhasilan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi Covid-19 juga tidak lepas dari kesiapan pemerintah dan masyarakat pada wabah ini. Upaya yang dilakukan bukan hanya di tingkat provinsi, namun juga sampai pada tingkat desa atau yang disebut juga dengan nagari. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah Nagari Tanggap Covid-19. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam hal mitigasi penanggulangan Covid-19 di tingkat nagari<sup>19</sup>.

Bentuk upaya yang dilakukan di Nagari adalah melalui usaha Wali Nagari menjalin kerja sama dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, dan juga stakeholder yang ada di luar pemerintah nagari. Oleh karena itu, sangat diperlukan Wali Nagari yang memiliki kepemimpinan kolaboratif yang mampu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai bentuk penanggulangan Covid-19 di tingkat Nagari.

Penanggulangan wabah Covid-19 juga dilakukan di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Taram merupakan nagari berprestasi tahun

---

<sup>18</sup> Kabarsumbar.com, “Sumbar Masuk Lima Terbaik Pengendalian Covid-19”, Juli 2020. Diakses pada 25 Juli 2020.

<sup>19</sup> Indonews.id, “Nagari di Sumatera Barat ditengah Wabah Covid-19”, <https://indonews.id/artikel/29844/Nagari-di-Sumatera-Barat-Ditengah-Wabah-Covid-19/>, diakses pada 25 Juli 2020

2019 di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Nagari Taram juga memperoleh prestasi sebagai Nagari Terbaik 1 Regional I di tingkat nasional. Terdapat 16 keunggulan Nagari Taram yang ditonjolkan dalam perlombaan tersebut. Namun, kunci keberhasilan keberhasilan Nagari Taram adalah tingginya rasa memiliki dan kerjasama di antara masyarakat<sup>20</sup>. Selain itu, Sekretaris Nagari Taram juga mengungkapkan bahwa kekompakan di antara masyarakat, dan partisipasi yang tinggi di Nagari Taram juga tidak bisa dilepaskan dari sosok Wali Nagari Taram. Wali Nagari melakukan pendekatan emosional dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Nagari untuk bisa mendukung program yang dilaksanakannya. Sehingga, tokoh masyarakat tersebut mampu mendorong kaumnya untuk berpartisipasi di Nagari<sup>21</sup>.

Sebagai nagari yang memperoleh predikat nagari berprestasi pada tahun 2019, tentunya wabah Covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Nagari Taram. Wabah Covid-19 yang datang secara tiba-tiba membuat pemerintah harus bersiap dengan segala kemungkinan. Jika dalam kondisi normal, pemerintah dan masyarakat kompak menjalankan program secara kolektif, apakah hal ini juga mampu dilakukan dalam penanggulangan wabah Covid-19? Adanya wabah ini, tentu membutuhkan usaha bersama dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, secara tidak langsung akan memunculkan kerja sama dari berbagai pihak. Kerja sama tersebut, di tingkat nagari tentunya harus dikoordinir oleh Wali Nagari. Oleh karena itu, peneliti

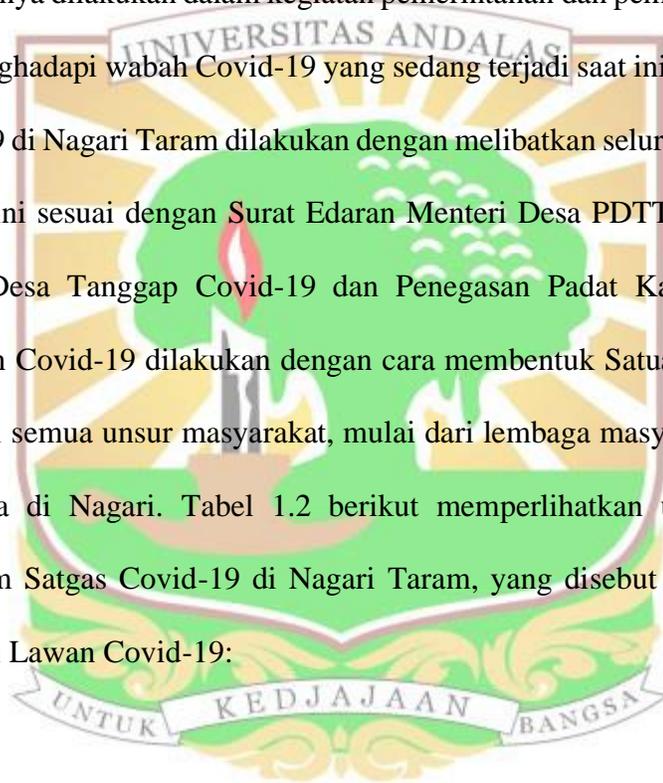
---

<sup>20</sup> Taram-limapuluhkotakab.id, “Nagari Taram Rewind Tahun 2019”, <https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2019/12/31/nagari-taram-rewind-tahun-2019> , Diakses pada 23 Agustus 2020

<sup>21</sup> Wawancara dengan Gusnedi, Sekretaris Nagari Taram Pada 03 Maret 2020 Pukul 15.00

tertarik untuk melihat kepemimpinan kolaboratif Wali Nagari Taram dalam penanggulangan wabah Covid-19. Peneliti berasumsi, dengan adanya Wabah Covid-19, akan merubah pola kepemimpinan Wali Nagari, dan memunculkan model baru kepemimpinan kolaboratif dalam penanggulangan bencana.

Pelibatan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Nagari Taram bukan hanya dilakukan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, namun juga dalam menghadapi wabah Covid-19 yang sedang terjadi saat ini. Penanggulangan wabah Covid-19 di Nagari Taram dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Nagari. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan cara membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari semua unsur masyarakat, mulai dari lembaga masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di Nagari. Tabel 1.2 berikut memperlihatkan unsur-unsur yang dilibatkan dalam Satgas Covid-19 di Nagari Taram, yang disebut juga dengan Tim Relawan Nagari Lawan Covid-19:



**Tabel 1.2**  
**Struktur Tim Relawan Nagari Lawan Covid-19**

No	Jabatan	Stakeholder
1	Ketua	Wali Nagari Taram
2	Wakil Ketua	Ketua Bamus Nagari Taram
3	Anggota	Perangkat Nagari (termasuk Kepala Jorong)
		Anggota Bamus
		Linmas Nagari
		PLD Kecamatan Harau
		Tokoh Masyarakat
		KPMD
		PD Kecamatan Harau
		TP-PKK
		Kader Pangan
		Bidan Desa
		Karang Taruna
		Munag Taram
		Tokoh Masyarakat
4	Mitra	Babinsa
		Babinkamtibmas
		Perantau
		Gerakan Mahasiswa (Gema) Nagari Taram
		Pengurus Mesjid

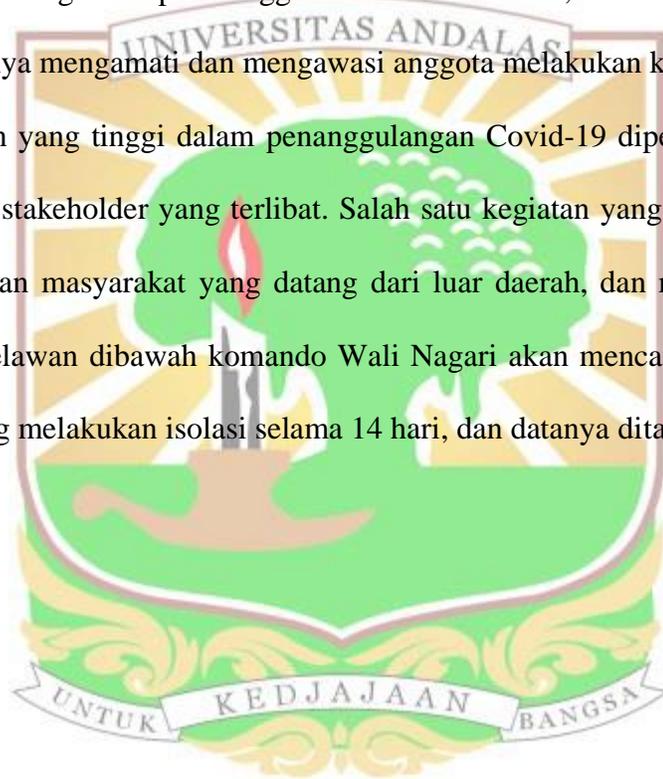
Sumber: SK Tim Relawan Lawan Covid-19 Nagari Taram, Diolah, 2020

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Nagari Taram, melibatkan banyak unsur yang ada di Nagari. Tim Relawan tersebut diketuai langsung oleh Wali Nagari, dan Ketua Bamus sebaga wakil ketua. Selain itu, pemerintah nagari juga menjalin mitra dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Perantau, Mahasiswa, dan Pengurus mesjid yang ada di Nagari Taram. Semua aktor tersebut dilibatkan mulai dari tahap perencanaan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilakukan, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, serta evaluasi kegiatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, peran Wali Nagari dalam menggerakkan semua anggota sangat dibutuhkan. Hal ini juga dikarenakan semakin banyaknya

stakeholder yang dilibatkan, semakin banyak karakter yang harus dikelola oleh Wali Nagari.

Tim Relawan Lawan Covid-19 di Nagari Taram menjalankan kegiatan sesuai dengan instruksi dari Surat Edaran Mendes PDTT. Setelah tim relawan terbentuk, tim akan melakukan perencanaan kegiatan melalui musyawarah. Kemudian akan dilakukan pembagian jadwal tugas dan piket anggota tim. Dalam hal ini, Wali Nagari juga terlibat aktif, bukan hanya mengamati dan mengawasi anggota melakukan kegiatan.

Komitmen yang tinggi dalam penanggulangan Covid-19 diperlihatkan melalui aksi nyata oleh stakeholder yang terlibat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan pendataan masyarakat yang datang dari luar daerah, dan melakukan isolasi mandiri. Tim relawan dibawah komando Wali Nagari akan mencatat perkembangan masyarakat yang melakukan isolasi selama 14 hari, dan datanya ditampilkan di kantor Wali Nagari.





Selain itu, Wali Nagari Taram juga merangkul mahasiswa yang ada di Nagari untuk dapat bersama-sama menangani wabah Covid-19 di nagari. Nagari Taram memiliki ikatan mahasiswa dengan nama Gerakan Mahasiswa (Gema) Nagari Taram. Berdasarkan wawancara dengan anggota satgas Covid-19 di Nagari Taram, Ibu Elviasni, mahasiswa juga merupakan salah satu unsur yang paling berperan dalam penanggulangan Covid-19 di Nagari. Wali Nagari Taram mendukung semua program yang dibuat oleh mahasiswa<sup>22</sup>.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Tim Satgas adalah pada saat shalat jumat, ibu-ibu dan mahasiswi berjaga-jaga di pos perbatasan nagari, agar tidak ada masyarakat luar Nagari Taram yang ikut menunaikan shalat jumat berjamaah di nagari. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya wabah covid-19 ke nagari. Selain itu, pada saat masa PSBB berakhir, Tim Satgas bersama-sama dengan Gema juga melaksanakan kegiatan senam bersama dan bersepeda, dalam rangka tetap menjaga agar tubuh tidak mudah terserang virus. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari, juga disebutkan bahwa Wali Nagari bahkan ikut mendukung kegiatan yang digagas oleh mahasiswa ini dengan dana pribadi untuk keperluan pembelian konsumsi.

Selain dengan tim relawan, Wali Nagari Taram juga merangkul aktor-aktor lain yang berperan di Nagari, salah satunya niniak mamak. Nagari Taram merupakan nagari yang masih menjunjung tinggi adat. Masyarakat Nagari Taram sangat menghargai posisi *niniak mamak* dalam kaum, yang merupakan orang yang sangat disegani.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Elviasni, anggota Satgas Covid-19 Nagari Taram pada 5 Agustus 2020 Pukul 10.30 WIB

Sekretaris Nagari Taram dalam wawancaranya menyatakan bahwa masyarakat sangat patuh dengan *niniak mamak*. Sehingga, kekuatan utama untuk menggerakkan masyarakat terdapat pada *niniak mamak* masing-masing kaum<sup>23</sup>. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Wali Nagari Taram untuk menangani Covid-19 di Nagari. Langkah yang dilakukan oleh Wali Nagari adalah dengan berkumpul bersama *niniak mamak* dari masing-masing kaum yang ada di nagari. Kemudian, Wali Nagari memberikan edukasi terkait Covid-19 dan penanggulangannya. *Niniak mamak* akan memberitahu dan menjelaskan kepada kaum terkait bahaya covid-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan<sup>24</sup>. Dalam hal ini, Wali Nagari dan stakeholder yang ada di Nagari Taram sama-sama memiliki komitmen yang kuat dalam menangani Covid-19 di nagari.

Keberhasilan Wali Nagari Taram dalam mengkoordinir stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19 di Nagari Taram mengantarkan Nagari Taram menjadi Kampung Tangguh dalam penanggulangan Covid-19 di tingkat Nagari<sup>25</sup>. Selain itu, Di samping itu, sampai tanggal 6 Agustus 2020, tercatat ada 94 orang pelaku perjalanan dari daerah terjangkit (PPT) yang harus diisolasi, dan dipantau perkembangan hariannya oleh tim relawan. Namun, sampai saat ini belum ada satupun kasus positif Covid-19 yang ditemukan di nagari ini.

Peneliti berasumsi bahwa Wali Nagari taram menerapkan kepemimpinan kolaboratif sehingga mampu merangkul semua stakeholder dalam penanggulangan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Gusnedy, Sekretaris Nagari Taram Pada 03 Maret 2020 Pukul 15.00

<sup>24</sup> Wawancara dengan Gusnedy, Sekretaris Nagari Taram pada 5 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB

<sup>25</sup> Posmetropadang.co.id, "Taram Kampung Tangguh Covid-19", <https://posmetropadang.co.id/taram-kampung-tangguh-covid-19/>. Diakses pada 23 Agustus 2020

wabah ini. Penanggulangan Covid-19 tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Nagari, tanpa bekerja sama dengan semua unsur yang ada di nagari. Tingginya tingkat keterlibatan berbagai unsur di Nagari Taram dalam penanggulangan Covid-19 tentu tidak lepas dari kepemimpinan Wali Nagari yang mampu mengkoordinir Tim Relawan Nagari dan stakeholder yang lain penanggulangan wabah ini. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang muncul adalah *Bagaimana Model Kepemimpinan Kolaboratif Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penanggulangan Wabah Covid-19?*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kepemimpinan kolaboratif Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan wabah Covid-19.

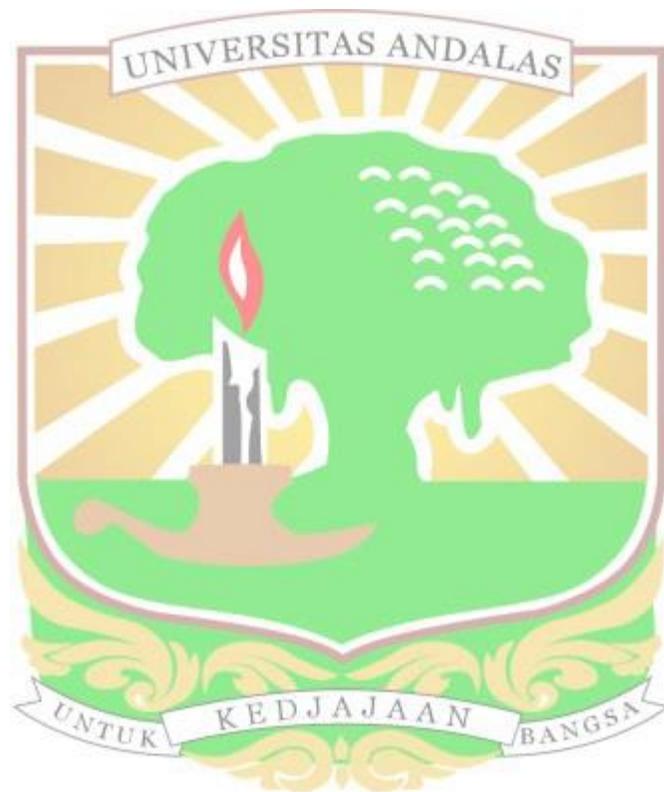
### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu Administrasi Publik terutama dalam bidang kepemimpinan kolaboratif di tingkat desa. Pada dasarnya penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan pada konsentrasi Manajemen Publik.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan acuan bagi Wali Nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat terkait penanggulangan wabah Covid-19 di tingkat nagari.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan. Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini adalah “*Collaborative Leadership in a Study Centre Context*” oleh Patricia M. Woolford, dan John Colvin. Penelitian ini mengembangkan model kepemimpinan kolaboratif menggunakan enam kriteria untuk keefektifan kepemimpinan kolaboratif dari Kellogg dan Robert Wood Jonshon yaitu (1) menilai lingkungan (2) membuat kejelasan (3) membangun kepercayaan (4) berbagi kekuatan (5) mengembangkan orang-orang (6) refleksi diri<sup>26</sup>. Temuan dari penelitian ini adalah kepemimpinan kolaboratif dapat dikembangkan melalui tahapan kepemimpinan individu, kemudian masuk ke kepemimpinan kolaboratif, dan menghasilkan output pemecahan masalah melalui kolaborasi.

Selanjutnya penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah “*Collaborative Leadership: New Perspective in Leadership Development*” oleh A. De Meyer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kunci yang menggambarkan pemimpin masa depan, yaitu kolaborasi, mampu mendengarkan, mempengaruhi, dan beradaptasi. Sedangkan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam kepemimpinan kolaboratif yaitu: (1) pola pikir yang benar, (2) mengurangi biaya transaksi, (3) mampu melihat lebih luas melampaui organisasi, (4)

---

<sup>26</sup> Kathleen M Gardner, Patricia M Woolford, John Colvin, “Collaborative Leadership in a Study Centre Context”, (Book Chapter Collaborative research, London: CSIS, 2007. Pp. 13-26)